

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016)

Sejak Pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi mendorong pemerintah melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, memaksimalkan pembangunan daerahnya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 2) Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 3) Mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 4) Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 yang berjumlah 34 Kabupaten dan Kota. Teknik Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara signifikan dan simultan berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Modal

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE , GENERAL ALLOCATION FUND, AND REVENUE SHARING FUND TOWARDS THE ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE BUDGET

(Study in District/City Governments in Jawa Tengah 2016)

Since the Indonesian Government was hit by the economic crisis, the government released some financial management authority to regions. Regional autonomy begins with the issuance of Law No. 32 of 2004 concerning the Regional Government and Law No. 33 of 2004 concerning Financial Balance between Central and Regional Governments. The enactment of regional autonomy provides the opportunity for regional governments to further develop regional potential, maximize their regional development and improve regional financial performance so that it does not depend on the central government. The purpose of this study is to: 1) Know the effect of local revenue on the Allocation of Capital Expenditure Budget. 2) Knowing the effect of the General Allocation Fund on the Allocation of Capital Expenditure Budget. 3) Knowing the Effect of Revenue Sharing Funds on the Allocation of Capital Expenditure Budget. 4) Knowing the Effect of Local Revenue, General Allocation Funds and Revenue Sharing Funds on the Allocation of Capital Expenditure Budget in Districts and Cities in Central Java Province. The population in this study were all regencies and cities in Central Java Province in 2016, which numbered 34 regencies and cities. Data collection techniques using the documentation method. The results of the study show that the Local Revenue, General Allocation Funds and Profit Sharing Funds significantly and simultaneously affect the allocation of the Capital Expenditures Budget.

Keywords: Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), Capital Expenditures